

BAB II

INDONESIA DAN KOREA SELATAN PADA MASA PANDEMI

2.1 Latar Belakang Pandemi COVID-19

Wabah Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di laporkan mulai pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejumlah kasus pneumonia atipikal dengan gejala seperti sindrom pernafasan akut parah (SARS). Setelah diidentifikasi penyakit tersebut disebabkan oleh virus baru yang disebut sebagai *coronavirus severe acute respiratory syndrome 2* (SARS-CoV-2). Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. Virus corona bersifat zoonosis (penularan penyakit dari hewan ke manusia). Menurut penelitian, virus SARS merupakan transmisi dari *civet cats* (kucing luwak) ke manusia dan penyakit MERS dari unta ke manusia. Virus dari COVID-19 ini umumnya menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, tetapi faktanya virus tersebut juga menginfeksi organ lain seperti jantung, otak, ginjal, liver, pembuluh darah hingga saluran pencernaan (Rahmadia and Febriyani, 2020). Tingkat keparahan gejala COVID-19 dapat berkisar dari ringan, sedang hingga berat. Sakit kepala, pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan kehilangan indera perasa dan penciuman merupakan gejala yang umum. Namun, dalam situasi dan kasus tertentu, gejala dapat berupa demam tinggi, batuk yang mengeluarkan lendir, sesak napas, nyeri dada saat batuk dan bernapas. Gejala penyakit yang terjadi sangat erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh dan riwayat penyakit kronis penderita COVID-19 tersebut (Tanjung, 2021).

Hanya dalam beberapa bulan, wabah dari Wuhan dengan cepat meluas ke wilayah lain di China kemudian menyebar ke beberapa negara secara global termasuk Indonesia dan Korea Selatan melalui perjalanan internasional. Pandemi COVID-19 secara resmi diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020 karena melihat penyebarannya yang luas dan cepat hampir di semua benua. Pandemi virus COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia telah mempengaruhi hampir setiap manusia baik

secara langsung maupun tidak langsung (Pambudi, 2021). Banyak orang yang tidak siap untuk beradaptasi (*adjust*) dengan perubahan gaya hidup yang tiba-tiba. Beberapa orang mengalami kekhawatiran atau kepanikan yang berlebihan akibat wabah COVID-19, dan mereka mungkin juga berpikir secara tidak rasional. Mereka sering memendam rasa was-was dan berprasangka buruk terhadap mereka yang menunjukkan gejala penyakit COVID-19. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit mencari berita terkait COVID-19 dan mempersulit mereka untuk mengidentifikasi berita yang akurat sehingga menimbulkan kekhawatiran. Situasi seperti itu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, sulit tidur, sakit kepala, dan ketidaknyamanan fisik lainnya. Hal ini juga berdampak pada penurunan perekonomian negara yang jauh drastis pada masa pandemi (Setiawan, 2020).

Secara global, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luas dan bencana terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat. Jumlah kasus COVID-19 meningkat dengan cepat karena penularannya yang sederhana dan cepat, termasuk yang memerlukan perawatan mendesak dan mengakibatkan kematian. Pandemi COVID-19 juga memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dunia, menyebabkan masalah rantai pasokan, output yang lebih rendah, kehilangan pekerjaan, dan kerugian finansial yang cukup besar (Kusno, 2020). Berikut dampak utama COVID-19 secara signifikan:

1. Kesehatan dan Kematian

COVID-19 telah menyebabkan jutaan orang di seluruh dunia terinfeksi virus, dengan jumlah kematian yang tinggi. Virus ini memiliki potensi untuk menyebabkan penyakit parah bahkan kematian, terutama pada populasi rentan seperti orang tua, orang dengan penyakit kronis, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

2. Ekonomi

Pandemi ini telah memicu krisis ekonomi global. Banyak bisnis dan industri terpaksa menghentikan operasional mereka, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal, penurunan pendapatan, dan kebangkrutan. Industri pariwisata, perhotelan, perjalanan udara, dan hiburan adalah yang paling terdampak. Selain itu, rantai pasokan global terganggu, dan pasar keuangan mengalami volatilitas yang tinggi.

3. Pendidikan

Sektor pendidikan mengalami dampak signifikan. Sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia terpaksa beralih ke pembelajaran jarak jauh atau penutupan sementara. Ini menciptakan tantangan bagi siswa, guru, dan orang tua dalam hal akses terhadap teknologi, kurangnya interaksi sosial, dan penurunan kualitas pendidikan.

4. Ketenagakerjaan

Pandemi ini telah menyebabkan kehilangan pekerjaan massal dan meningkatnya tingkat pengangguran di banyak negara. Banyak sektor, seperti perhotelan, restoran, ritel, dan penerbangan, terpaksa merumahkan atau memberhentikan karyawan mereka. Para pekerja terdampak juga mengalami ketidakpastian ekonomi dan kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.

5. Kesejahteraan Mental

Isolasi sosial, kekhawatiran akan kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat, serta tekanan finansial, telah menyebabkan peningkatan masalah kesehatan mental di masyarakat. Stres, kecemasan, depresi, dan kesepian menjadi lebih umum selama periode pandemi ini.

6. Sosial dan Psikologis

COVID-19 telah mengubah cara hidup dan interaksi sosial kita. Pembatasan perjalanan, aturan lockdown, dan larangan berkumpul mengubah dinamika sosial. Banyak acara besar, seperti konser, festival, dan olahraga, dibatalkan atau ditunda. Ketidakpastian dan ketakutan yang melingkupi pandemi ini juga berdampak pada kestabilan emosional dan psikologis masyarakat.

7. Perubahan Kebijakan dan Tataan Sosial

Negara-negara di seluruh dunia telah mengimplementasikan kebijakan baru seperti pembatasan perjalanan, karantina, penutupan sekolah, dan aturan masker untuk mengendalikan penyebaran virus. Perubahan ini telah membawa dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengubah tatanan sosial yang kita kenal.

8. Perkembangan Vaksin dan Penelitian Medis

Pandemi ini juga telah mempercepat penelitian medis dan pengembangan vaksin. Sejumlah vaksin COVID-19 telah dikembangkan dalam waktu singkat dan telah

diberikan kepada miliaran orang di seluruh dunia. Meskipun vaksinasi telah memberikan harapan, tantangan seperti akses kesetaraan vaksin masih ada di beberapa negara.

Dampak COVID-19 secara global sangat kompleks dan terus berkembang seiring waktu. Negara beserta masyarakat di seluruh dunia terus beradaptasi dan mencari solusi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Untuk memerangi virus dan mengurangi dampaknya selama pandemi, negara-negara berkolaborasi di berbagai tingkatan, baik secara regional maupun global. kerjasama bilateral dan multilateral dilakukan, serta Organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam mengatur tanggapan dunia terhadap pandemi ini mengambil sikap yang serius. Pandemi COVID-19 diperangi dengan langkah-langkah pengendalian seperti larangan perjalanan internasional, penguncian regional, pemakaian masker, isolasi sosial, peningkatan tes skrining serta pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin COVID-19 dijadikan fokus utama dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 (Yamali and Putri, 2020).

Tabel 2.1 Data Perkembangan COVID-19 di beberapa Provinsi di Indonesia dengan kasus kematian terbesar

Provinsi	Dirawat	Terkonfirmasi	Sembuh	Meninggal
DKI Jakarta	7.330	1.141.024	1.121.197	12.497
Jawa Barat	5.170	944.335	926.290	12.875
Jawa Tengah	1.280	510.662	482.541	26.841
Jawa Timur	714	483.527	457.363	25.450
Banten	1.316	269.180	265.513	2.351
Daerah Istimewa Yogyakarta	530	179.894	174.606	4.758
Kalimantan Timur	245	167.437	162.570	4.622
Bali	242	133.691	129.647	3.802
Sumatera Utara	346	127.325	124.366	2.613
Riau	123	122.378	118.672	3.583
Sulawesi Selatan	195	115.909	113.736	1.978
Sumatera Barat	164	83.866	81.784	1.918
Nusa Tenggara Timur	209	75.847	74.435	1.203

Kalimantan Selatan	59	70.308	68.196	2.053
Sumatera Selatan	208	65.963	63.008	2.747
Lampung	159	60.631	57.117	3.355
Kepulauan Riau	80	56.500	54.911	1.509
Kepulauan Bangka Belitung	91	53.006	51.617	1.298
Sulawesi Tengah	138	49.076	47.545	1.393
Kalimantan Tengah	36	46.734	45.457	1.241
Aceh	98	35.338	33.440	1.800

Sumber: (Yamali and Putri, 2020)

<https://www.antaranews.com/covid-19>

Badan kesehatan dunia (WHO) telah mencabut status PHEIC (*public health emergency of internasional concern*) untuk pandemi COVID-19 pada 5 mei 2023, hal tersebut berhubungan dengan penurunan signifikan kejadian penyakit COVID-19 tersebut. Akan tetapi, walaupun status kegawatdaruratan pandemi COVID-19 telah dicabut, kasus pandemi ini masih menjadi perhatian karena telah banyak korban dari penyakit ini, masyarakat dan pemerintah tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk mencegah kasus pandemi ini menyerang kembali, karena terdapat varian-varian baru dari mutasi virus (Nafrin and Hudaidah, 2021).

2.2 Indonesia dan Korea Selatan Dimasa Pandemi

Sejak awal tahun 2020, COVID-19 semakin meluas dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kepentingan masing-masing negara telah berubah sebagai akibat dari berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sejak wabah terjadi. Upaya pemberantasan COVID-19 dan menghentikan dampak buruk pandemi menjadi prioritas utama. Nilai kerjasama internasional diperuntukkan untuk meningkatkan infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, dan pentingnya multilateralisme dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Diplomasi Indonesia harus semakin tegas, luwes, dan berpikir cepat agar dapat terus mempengaruhi perubahan global dalam melawan wabah COVID-19 (Purbantina and Hapsari, 2020).

Menteri luar negeri Indonesia pada Januari 2021, yakni ibu Retno Marsudi mengungkapkan prioritas utama diplomasi Indonesia, salah satunya adalah "Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional." Masalah COVID-19 yang belum tertangani dengan baik, serta rendahnya tingkat vaksinasi yang hanya 5,2% penduduk yang mendapatkan vaksinasi lengkap pada saat itu, mendukung urgensi Indonesia untuk segera mengakhiri pandemi dengan melakukan gerak cepat vaksin COVID-19 (Sihaloho, 2020). Menurut penilaian terbaru dari divisi intelijen *The Economist*, yang mengklaim bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan mendapatkan vaksin lengkap pada awal tahun 2023, upaya imunisasi di Indonesia masih kalah gencar dibandingkan negara lain. Masalah ini membutuhkan perhatian cepat karena kemampuan masyarakat Indonesia untuk menahan pandemi COVID-19 sangat penting untuk dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari. Untuk memajukan tujuan nasional, seperti memupuk kemandirian dan memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan kerjasama dengan negara lain (Amri, 2020).

Untuk penanganan pandemi yang lebih baik, menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa diperlukan kerjasama dari negara-negara untuk memulihkan kembali dunia secara bersama-sama, diperlukan kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya memerangi wabah COVID-19. Dengan bekerja sama, kita dapat meningkatkan ketahanan kesehatan global dan mempercepat pemulihan. Salah satu langkah Indonesia untuk pulih dari wabah tersebut adalah dengan bekerja sama dengan Korea Selatan, dimana Indonesia melakukan diplomasi vaksin dimana Korea Selatan menawarkan vaksinnya ke Indonesia. Selain itu, Korea Selatan menyatakan bahwa sambil berjuang untuk memproduksi vaksin untuk Indonesia, pihaknya bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun fasilitas produksi vaksin regional. Baik Indonesia maupun Korea Selatan "sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan kehidupan masyarakat dan berdedikasi untuk menghentikan penyebaran COVID-19" (Noerkaisar, 2021).

Dengan adanya wabah COVID-19, banyak negara kembali didorong untuk menggunakan diplomasi kesehatan. Meski bukan konsep baru, diplomasi kesehatan jarang digunakan. Komunitas Kesehatan Masyarakat telah memberikan banyak definisi diplomasi kesehatan. Feldbaum dan Michaud mengklaim bahwa istilah "diplomasi kesehatan" menggabungkan penjelasan proses negosiasi kesehatan, efek kesehatan dari

negosiasi non-kesehatan, dan tujuan kebijakan luar negeri untuk mempromosikan kesehatan global. Kickbusch, Silberschmidt, dan Buss menawarkan perspektif yang berbeda, percaya bahwa diplomasi kesehatan global berusaha untuk menangkap proses negosiasi multi-level dan multi-aktor yang membentuk dan mengatur lingkungan kebijakan kesehatan dunia (Livana *et al.*, 2020). Teori diplomasi kesehatan lainnya, di sisi lain, kurang menekankan pada negosiasi dan fungsi utama kesehatan global dan menjelaskan upaya untuk memajukan kesehatan dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk melayani tujuan negara. Menurut Fauci, diplomasi kesehatan adalah strategi untuk memenangkan hati dan pikiran warga negara terbelakang dengan mengeksport layanan medis, pengetahuan, dan personel kepada mereka yang paling membutuhkannya. Ungkapan "diplomasi kesehatan" digunakan dalam berbagai cara untuk merujuk pada berbagai sudut pandang tentang aplikasi dan netralitas politik dari inisiatif kesehatan, yang keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kesehatan global akan berkembang di masa depan (Thaha, 2020).

Sejak COVID-19 pertama masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, inisiatif diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan terus dilakukan. Retno Marsudi, menteri luar negeri Indonesia, dilaporkan bekerja dengan penasehat negara dan aktor penting lainnya untuk mengimplementasikan perjanjian untuk memperdalam hubungan bilateral selama masa yang penuh tantangan ini. Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, melaporkan bahwa dalam pertemuan Indonesia dan Korsel, selain membicarakan bagaimana menghentikan penyebaran COVID-19, Menlu Retno juga menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Kor Selatan dapat terus meningkatkan kerjasamanya, termasuk dalam pengadaan pasokan. Kebutuhan kesehatan di Indonesia (Aji, 2020).

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in yang merupakan presiden dari kedua negara Indonesia dan Korea selatan juga berpartisipasi dalam diplomasi kesehatan ini. Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya kerjasama antar negara selama pandemi. Selain itu, Presiden Moon Jae-in menyebut bahwa negara Indonesia sebagai negara prioritas utama dalam pandemi COVID19 dalam hal kerja sama di bidang kesehatan. Tak hanya itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Cham-beom juga menyuarakan pentingnya kolaborasi antara Korea Selatan dan

Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari diplomasi antara petinggi Indonesia dan Korea Selatan, setelah terdampak COVID-19 selama beberapa bulan, Indonesia menerima 300 alat (Rechargeable Battery Powered Sprayer) atau alat penyemprot bertenaga baterai isi ulang, dengan total nilai bantuan US\$ 500.000. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Cham-beom, secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada BNPB pada 8 April 2020. Bantuan ini juga merupakan representasi dari pendekatan simbol persahabatan antara Korea Selatan dan Indonesia (Shiyammurti, Saputri and Syafira, 2020).

Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerja sama diplomasi vaksin sebagai bagian dari diplomasi kesehatan. Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mencari cara untuk bekerja sama dengan beberapa negara asing sejak Maret 2020 untuk mendapatkan akses vaksin COVID-19. Beberapa negara yang memproduksi vaksin yang menjadi distributor vaksin untuk Indonesia dapat ditemukan melalui penelusuran ini, salah satunya dari Korea Selatan. Terlihat bahwa diplomasi kesehatan yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan yang paling signifikan, meskipun Indonesia juga melakukan diplomasi kesehatan dengan negara lain, seperti diplomasi vaksin. Korea Selatan menjadi fokus diplomasi Indonesia karena dapat membantu Indonesia memajukan tujuan nasionalnya, khususnya dalam penanganan pandemi karena merupakan salah satu negara yang memiliki peralatan medis yang lengkap dan modern (Mansyur, 2020).

Di tengah pandemi COVID-19, diplomasi kesehatan bilateral dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan. Untuk mencapai kepentingan nasional dan memajukan kesehatan global, Feldbaum dan Michaud mencatat bahwa diplomasi kesehatan Indonesia-Korea Selatan meliputi negosiasi kesehatan dan pemberian bantuan kesehatan. Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan hanya melakukan diplomasi kesehatan bilateral, yang dipengaruhi oleh seberapa efektif diplomasi tersebut (Syahrial, 2020).

Negara-negara juga menyadari bahwa diplomasi kesehatan yang dilakukan pada tingkat multilateral hingga global kurang berhasil. Untuk memerangi penyebaran penyakit ini, akan lebih efektif dan efisien untuk bekerja sama dengan lebih sedikit aktor di tingkat bilateral hingga regional. Terakhir, negara-negara melihat manfaat strategis

jangka panjang dari diplomasi bilateral dan regional. Hal ini dapat membantu bangsa dalam membangun dan meningkatkan hubungan positif yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan politik luar negeri di masa depan. Diplomasi kesehatan Indonesia-Korea Selatan adalah tindakan yang tepat dalam menghadapi pandemi (Goma, 2021).

Pemerintah telah mempercepat upaya imunisasi sebagai dampak dari tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Indonesia termasuk dalam kelompok *Advanced Market Commitment*, yang menyiratkan bahwa WHO akan berkomitmen untuk menyediakan vaksin sebanyak 20% dari populasi warga negara. Namun, untuk mempercepat vaksinasi, persentase ini tidak mencukupi. Indonesia harus melakukan diplomasi bilateral dengan negara sahabat, salah satunya Korea Selatan, untuk mencapai target imunisasi. Indonesia mendapat manfaat dari kerjasama vaksinasi Korea Selatan sebagai hasil dari hubungan diplomatik yang baik antara kedua negara. Salah satu keunggulan Indonesia dalam upaya diplomasi kesehatan ini adalah kuatnya hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Filipina, Kamboja, Singapura, dan Indonesia menjadi negara ASEAN dengan tingkat imunisasi tertinggi per akhir Mei 2021, menurut data dari *Our World in Data* (Akbar, 2021).

Kerja sama vaksin antara Korea Selatan dan Indonesia telah meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Selain memberikan bantuan untuk penyediaan dan pemenuhan kebutuhan vaksinasi di Indonesia, Korea Selatan juga membantu Indonesia dalam pembangunan fasilitas produksi vaksin yang memungkinkan Indonesia menjadi produsen vaksin untuk kawasan Asia Tenggara. Pembangunan fasilitas ini meningkatkan keunggulan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan di panggung global selain menguntungkan secara finansial. Berkat transfer pengetahuan dan teknologi dari Korea Selatan, fasilitas tersebut akan meningkatkan penelitian dan pengembangan vaksin nasional serta meningkatkan standar infrastruktur kesehatan. Kerja sama ini akan memungkinkan perekonomian kedua negara yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, pulih kembali selain meningkatkan hubungan perdagangan dan hubungan antar negara (Gandryani and Hadi, 2021). Karena Korea Selatan adalah produsen vaksin yang ingin membagi pasokannya, kerjasama vaksinasi dengan Korea Selatan akan memastikan pasokan vaksin untuk Indonesia.

Kerjasama internasional diperlukan untuk memerangi pandemi COVID-19, karena banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat dan negara barat lainnya, yang mampu memproduksi vaksin dan bahkan memasok vaksin berkali-kali lebih besar dari populasi negara mereka sendiri, negara berkembang seperti Indonesia harus mencari pemasok dari daerah lain. Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Korea Selatan, negara yang bersedia memberikan vaksinasi dengan Indonesia. Dengan hubungan yang erat ini lah, Indonesia memiliki akses vaksin yang lebih besar dibandingkan negara lain (Makmun and Hazhiyah, 2020).

Produksi vaksin yang cepat dan pengiriman vaksin yang tepat waktu dibutuhkan Indonesia untuk memenuhi target vaksinasi hariannya. Target imunisasi di Indonesia adalah 181 juta orang yang memerlukan 426 juta dosis vaksin. Pemerintah segera melakukan percepatan vaksinasi dengan target harian satu juta vaksinasi per hari, sebagai respon atas lonjakan kasus dan gelombang kedua yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Karena kebutuhan vaksin yang mendesak saat itu, yang sempat menyebabkan keterlambatan impor *azenastreca* dari Korea Selatan karena tingkat stok yang rendah, Indonesia telah bekerja sama secara bilateral dengan negara lain seperti China untuk mendatangkan vaksin *sinovac* ke Indonesia guna memenuhi kebutuhan vaksin negara yang mendesak (Gurning et al., 2021).

Pendistribusian ke seluruh wilayah Indonesia vaksin dari Korea Selatan ini, membutuhkan suhu penyimpanan 2°C s.d 8°C. Hal ini membuat penyimpanan saat pendistribusian vaksin menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan suhu lemari es atau *freezer* yang rata-rata dapat menghasilkan suhu hingga -4°C. Ini karena vaksinasi *Astrazeneca* merupakan vaksin dari virus lumpuhkan atau di lemahkan. Dibandingkan dengan vaksin berbasis mRNA (*messenger RNA*) seperti *Moderna* dan *Pfizer*, yang membutuhkan suhu penyimpanan masing-masing antara -15°C s.d -20°C dan -70°C s.d -80°C, sehingga penyimpanan dan pendistribusian *astrazeneca* ini lebih sederhana dan mudah. Salah satu keuntungan vaksinasi ini adalah kemudahan penyimpanannya, karena dapat disimpan hingga tiga tahun tanpa menggunakan lemari es khusus. Salah satu alasan Indonesia menjalin kerja sama vaksinasi dengan Korea Selatan adalah kemudahan dan kecepatan distribusi vaksin (Gurning et al., 2021).

Semua orang di seluruh dunia sekarang menjalani kehidupan yang berbeda sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Manusia dituntut untuk perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan peristiwa ini guna memberikan reaksi terbaik terhadap kebutuhan akan perubahan yang terjadi. Namun, sejumlah besar orang percaya bahwa COVID-19 justru akan menjadi berkah tersembunyi karena menghadirkan dua kemungkinan kunci bagi diplomasi kesehatan Indonesia dan Korea Selatan. pertama adalah Indonesia beruntung mendapatkan dukungan dari Korea Selatan berupa teknologi modern untuk menangani kasus COVID-19 yang meningkat pesat (Stephanie *et al.*, 2021). Kedua, karena intensitas hubungan mereka yang dirasakan, Indonesia dan Korea Selatan kemungkinan akan bekerja sama dalam bidang lain di masa depan dengan proyek yang lebih besar. Serta memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengendalian negara, yang kemudian dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan Indonesia, kolaborasi diplomasi kesehatan diharapkan dapat menunjukkan hasil klinis yang menggembirakan. Untuk mempertahankan komunikasi dan kerja sama yang intensif dalam urusan internasional dan regional, negara-negara harus meningkatkan sinergi mereka (Dewi, 2021).

Menurut Kim Cham-beom, duta besar Korea Selatan untuk Indonesia, Alat paling efektif bagi umat manusia untuk memerangi bencana saat ini adalah solidaritas dan kerja sama. Korea Selatan kemudian mengirimkan 50 ribu *polymerase chain reaction (PCR) test kit* COVID-19 dan 1 juta bahan baku alat pelindung diri ke Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Doni Monardo, Kepala BNPB dan sekaligus ketua Tim Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Doni Monardo mengungkapkan, impor bahan baku APD dilakukan, kemudian di olah menjadi APD jadi dan di ekspor kembali ke Korea Selatan. Ini adalah hasil kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri yang meningkat secara signifikan. Tentunya kerjasama ini menguntungkan untuk Indonesia maupun Korea Selatan (Sutari, Idris and Misnaniarti, 2022).

Dari kerjasama bilateral sebelumnya, diperkirakan akan ada prospek kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di ranah lain yang lebih signifikan. Hubungan Indonesia-Korea Selatan masih berkembang pesat karena Indonesia terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang sejalan dengan kesejahteraan negara dan menghadapi

masalah wabah COVID-19. Indonesia dan Korea Selatan diperkirakan akan menjalin kerjasama di berbagai bidang di masa depan mengingat hubungan diplomatik mereka yang memanas saat ini. Situasi ini ditunjukkan oleh fakta bahwa meskipun ada banyak tantangan, perdagangan antara kedua negara tetap berkembang. Sementara Korea Selatan akan terus membantu Indonesia dalam mengatasi COVID-19 dan bekerja sama dengan negara tersebut dalam penelitian vaksin, hubungan kedua negara telah meningkat karena cakupan kerja sama mereka yang lebih luas. Joko Widodo, Presiden Indonesia, menekankan nilai kolaborasi dan perlunya negara-negara bekerja sama sebagai tindakan terbaik dalam memerangi pandemi. Kedua negara akan bekerja sama lebih erat di masa depan untuk meningkatkan sinergi strategi pembangunan mereka dengan melanjutkan bisnis dan produksi yang secara langsung memengaruhi mata pencaharian masyarakat, meningkatkan kolaborasi perawatan kesehatan, dan berkonsentrasi pada visi maritim besar Indonesia (Putri *et al.*, 2021).

Kedua negara akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam lembaga internasional dan regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), G20, dan *East Asia Cooperation* sehubungan dengan pandemi yang telah mengubah dunia secara signifikan. Hal ini dikatakan khusus untuk mendukung WHO dalam memerangi pandemi dan menegakkan sistem tata kelola global dengan PBB sebagai landasannya. Setiap upaya perencanaan politik pasti akan menghadapi tantangan dari kedua negara. Oleh karena itu, jika Korea Selatan dan Indonesia benar-benar ingin membangun hubungan diplomatik, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang lebih kuat, mereka harus mempertahankan ketulusan dan kejujuran (Junaedi and Salistia, 2020).

Konsep ancaman keamanan saat ini muncul sebagai akibat dari peningkatan kasus dan kematian akibat COVID-19 yang signifikan, dan meluas melampaui ancaman keamanan tradisional yang membahayakan keamanan negara menjadi ancaman non-tradisional yang lebih mementingkan keamanan orang-orang tertentu dan kelompok. Ancaman pembangunan manusia terhadap keamanan Dalam arti yang lebih luas, keamanan manusia mencakup upaya pencegahan gangguan yang membahayakan pola kehidupan sehari-hari, baik di tempat tinggal, tempat kerja, maupun masyarakat, serta

keamanan dari ancaman kelaparan, penyakit menular, represi, atau ketidakstabilan politik (Setiawan, 2020).

Selain menimbulkan pergolakan sosial dan membahayakan stabilitas negara dengan keruntuhan ekonomi yang parah, penyebaran COVID-19 secara langsung telah membahayakan kesehatan manusia di banyak negara di seluruh dunia. Dibandingkan dengan Indonesia, Korea Selatan memiliki jumlah kematian yang lebih sedikit, dari 10.661 kasus terinfeksi, 8.042 pasien sembuh (75,4%) dengan tingkat kematian hanya 2,1%, atau 234 korban (Sutari, Idris and Misnaniarti, 2022). Sekjen PBB Antonio Guterres pun memuji upaya pemerintah Korea Selatan yang dinilai berhasil dalam mengatasi isu Covid-19. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah tidak pernah menerapkan strategi penguncian total, pengujian intensif, pelacakan, isolasi, dan pengawasan ketat dianggap sebagai kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Korea Selatan. Keberhasilan korea selatan tersebut meningkatkan semangat kerjasama Indonesia terhadap Korea Selatan, dan Korea Selatan telah berkomitmen dengan Indonesia bersama-sama melawan pandemi (Gandryani and Hadi, 2021).

Wabah pandemi yang disebabkan SARS-CoV-2/Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan krisis kesehatan dunia, masyarakat, ekonomi, dan kepemimpinan politik. Secara ekonomi, pandemi Covid-19 diprediksi akan mengakibatkan resesi ekonomi dunia minus 3 persen dan penurunan volume perdagangan dunia minus 11 persen pada akhir tahun 2020. jangka kemerosotan ekonomi global pada kuartal kedua tahun 2020. IMF dan Bank Dunia juga menggarisbawahi bahwa pandemi ini dapat mengakibatkan peningkatan hingga 50 juta orang dalam populasi miskin dunia. Pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi rata-rata menjadi minus 4 untuk kawasan Asia-Pasifik, yang selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat (Goma, 2021). Keadaan ini juga menyebabkan penurunan PDB negara, penurunan biaya produk, defisit neraca berjalan, dan kenaikan tingkat pengangguran. Indonesia tidak terkecuali; Wabah COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,9% pada triwulan pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan -5,3 persen bahkan memasuki

triwulan kedua tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun yang biasanya di kisaran 5%, jauh lebih rendah dari angka ini (Livana *et al.*, 2020).

Kondisi Indonesia di masa pandemi sangat memprihatinkan, dengan gangguan yang datang dari berbagai sektor. COVID-19 jelas terkait dengan perekonomian negara, selain dari sektor kesehatan. Alhasil, selain tujuan utamanya diplomasi kesehatan, Indonesia terus melakukan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu tujuan strategis, titik fokus, dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi dinamika politik internasional. Ia juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia terlebih di tengah pandemi yang melanda. Pendekatan investasi perdagangan, meningkatkan persaingan, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan produktivitas adalah contoh diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi di tengah pandemi Indonesia di fokuskan untuk mengekspor komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), alat medis (Alat pelindung diri, masker, vaksin, alat tes antigen dan PCR) selain fokus menawarkan fasilitas ekspor-impor untuk barang makanan olahan. Dengan diperolehnya Export Approval (PE) melalui sistem Indonesian National Single Window (INSW), mendorong ekspor pakaian pelindung diri dan masker dengan mempertimbangkan ketersediaan di dalam negeri (Thaha, 2020).

Perubahan strategi diplomasi ekonomi merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap ada peningkatan perekonomian nasional Indonesia, khususnya di bidang perdagangan dan industri. Diplomasi ekonomi dalam situasi ini bertujuan untuk “menahan” dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan mendukung kinerja ekspor-impor. Dengan menempatkan agen perdagangan Indonesia di luar negeri secara strategis, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga memajukan diplomasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi terkini mengenai perubahan keadaan negara tujuan ekspor dan untuk mendorong promosi ekspor dan virtual business matching. Agar eksportir Indonesia tetap dapat mengakses pasar dan mengetahui hukum atau kebijakan terbaru di negara tujuan selama pandemi, sinergi antara pejabat perdagangan Indonesia dan pelaku usaha juga diupayakan (Pambudi, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 677,2 triliun untuk merespons krisis kesehatan dan prospek resesi ekonomi global dan nasional, dengan

tujuan mempercepat respons pandemi COVID-19 dan membangkitkan perekonomian nasional. Anggaran ini disisihkan untuk meringankan kewajiban perpajakan, mendukung sektor industri, mendukung sektor kesehatan, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah, dan memberikan jaminan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaan (Stephanie *et al.*, 2021).

Korea Selatan juga tidak luput dari dampak ekonomi dari COVID-19. Tetapi untuk negara besar seperti Korea Selatan tidak mengalami krisis yang begitu berarti akan tetapi, dampak COVID-19 cukup membuat guncangan untuk Korea Selatan. Disebabkan oleh hal tersebut Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama bilateral percepatan penanganan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi kedua negara ditengah pandemi yang terjadi (Syahril, 2020).